PENGARUH PENYELENGGARAAN HAJI TERHADAP PENINGKATAN AKTIVITAS EKONOMI DI WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA

Chairul Akmal

Fakultas Syari'ah dan Ekomomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Email: akmalnanda@yahoo.com HP. 081289595958

Abstract

This research analyzes some factors affecting economic activities in relation with the conduct of pilgrimage. Those factors are the pilgrimage cost, the amount of pilgrims, and the amount of pilgrimage officers. The objective of this research is to acquire the information of how each factor and all factors together affect the economic activities. This research also analyzes the effect of foods and drinks expenses, the effect of non-foods and drinks expenses, and the effect of miscellaneous expenses on UMKM – Micro, Small, Medium enterprises' economic activities.

This research is conducted in DKI Jakarta in 2007. The population of this research is the average economic activities in DKI Jakarta in 2007. There are 42 respondents (Banks), 157 respondents (travel agencies), and 50 respondents (UMKM – Micro, Small, Medium enterprises) which are taken as samples from the population using the purposive sampling method. The data is obtained by the researcher using questioners and secondary data which is taken from 1990-2007.

The methodology used in this research is based on the causal relationship model. In testing the hypothesis of this research, the researcher uses the simple and multiple regression methods, and path analysis method. The significant rate $\alpha = 0.05$ used in determining the interpretation of the statistic result. The data is processed using SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) version 12.00.

The results of the analysis in the 1st equation are (i) the effect of the pilgrimage cost on banks' revenues is quite strong, (ii) the effect of the pilgrimage cost on travel agencies' revenues is quite strong, (iii) the effect of the pilgrimage cost on UMKM – Micro, Small, Medium enterprises' revenues is weak.

The results of the analysis in the 2nd equation are (i) the effect of the amount of pilgrims on Banks' revenues is very weak, (ii) the effect of the amount of pilgrims on travel agencies' revenues is very weak, (iii) the effect of the amount of pilgrims on UMKM – Micro, Small, Medium enterprises' revenues is very weak.

The results of the analysis in the 3rd equation are (i) the effect of the amount of pilgrimage officers on banks' revenues is very weak, (ii) the effect of the amount of pilgrimage officers on travel agencies' revenues is very weak, (iii) the

effect of the umount of pilgrimage officers on UMKM — Micro, Small, Medium enterprises' revenues is very weak.

The results of the analysis in the 4th equation are (i) the effect of all three factors which are the pilgrimage cost, the amount of pilgrims, and the amount of pilgrimage officers simultaneously on banks' revenues is very strong, (ii) The effect of all three factors which are pilgrimage costs, the amount of pilgrims, and the amount of pilgrimage officers simultaneously on travel agencies' revenues is strong, (iii) The effect of all three factors which are pilgrimage costs, the amount of pilgrims, and the amount of pilgrimage officers simultaneously on UMKM – Micro, Small, Medium enterprises' revenues is strong.

The result of the analysis in the 5th equation is the effect of foods and drinks expenses on UMKM — Micro, Small, Medium enterprises' revenues is weak. In the 6th equation, the effect of non-foods and drinks expenses on UMKM — Micro, Small, Medium enterprises' revenues is weak. In the 7th equation, the effect of miscellaneous expenses on UMKM — Micro, Small, Medium enterprises' revenues is quite strong. In the 8th equation, the effect of all three factors which are the effect of foods and drinks expenses, the effect of non-foods and drinks expenses, and the effect of miscellaneous expenses simultaneously on UMKM — Micro, Small, Medium enterprises' revenues is quite strong.

The implication of the research results mentioned above is the factors in the conduct of pilgrimage do increase the economic activities (Banks, Travel Agencies, and UMKM — Micro, Small, Medium enterprises) in DKI Jakarta. Therefore, considering that matter, the General Director of the conduct of pilgrimage division of Department of Religion Republic of Indonesia should determine the pilgrimage cost which is affordable, increase the service, and provide a good information system which will result in a better conduct of the pilgrimage.

Key word: The Costs of Hajj, Hajj Officer, Travel Agency, UMKM

Abstrak

Penelitian ini menganalisis sejumlah faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan haji. Faktor-faktor tersebut adalah ongkos naik haji, jumlah jamaah haji, dan jumlah petugas haji. Kegiatan analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap faktor dan semua faktor secara bersama-sama terhadap aktivitas ekonomi. Disamping itu, juga dianalisis pengaruh biaya kebutuhan makanan/minuman, biaya kebutuhan non-makanan/minuman, dan biaya kebutuhan lain terhadap aktivitas ekonomi UMKM baik secara individu maupun secara bersama-sama.

Penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta pada tahun 2007. Populasi penelitian ini adalah rata-rata aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di DKI Jakarta pada tahun 2007 Dari jumlah populasi tersebut

diperoleh sebanyak 42 responden (perbankan), 157 responden (biro perjalaman) dan 50 responden (UMKM) sampel penelitian yang diambil melalui teknik sampling purposive. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kansioner buatan peneliti dan data sekunder yang diambil dari 1990-2007.

Desain penelitian ini menggunakan model bubungan sebab-akibat (causal relationship). Untuk menguji bipotesis penelitian digunakan teknik analisis statistik regresi sederhana linier dan berganda linier dan analisis jahur (path analysis). Taraf signifikansi yang digunakan untuk menentukan kebermaknaan hasil pengujian statistik adalah $\alpha = 0.05$. Data penelitian diolah dengan bantuan software SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) ver 12.00.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pada persamaan 1 terdapat (i) pengaruh ongkos naik haji terhadap pendapatan perbankan adalah cukup kuat, (ii) pengaruh ongkos naik haji terhadap pendapatan biro perjalanan adalah cukup kuat, dan (iii) pengaruh ongkos naik haji terhadap pendapatan UMKM adalah lemah.

Pada persamaan 2, terdapat (i) pengaruh jumlah baji terbadap pendapatan perbankan adalah sangat lemah, (ii) pengaruh jumlah baji terbadap pendapatan biro perjalanan adalah sangat lemah, dan (iii) pengaruh jumlah baji terbadap pendapatan UMKM adalah sangat lemah.

Pada persamaan 3, terdapat (i) pengaruh petugas baji terbadap pendapatan perbankan sangat lemah, (ii) pengaruh petugas baji terbadap pendapatan biro perjalanan adalah sangat lemah, dan (iii) pengaruh petugas baji terbadap pendapatan UMKM adalah sangat lemah.

Pada persamaan 4, terdapat (i) pengaruh ongkos naik baji, jumlah baji dan petugas haji terhadap pendapatan perbankan secara bersama-sama yang sangat kuat, (ii) pengaruh ongkos haji, jumlah haji dan petugas baji terhadap pendapatan biro perjalanan secara bersama-sama adalah kuat, dan (iii) pengaruh ongkos haji, jumlah haji dan petugas baji terhadap pendapatan UMKM secara bersama-sama adalah kuat.

Dan, pada persamaan 5, terdapat pengaruh biaya kebutuhan makanan dan minuman terhadap pendapatan UMKM adalah lemah. Pada persamaan 6, terdapat pengaruh biaya kebutuhan non makanan dan minuman terhadap pendapatan UMKM adalah lemah. Pada persamaan 7, terdapat pengaruh biaya kebutuhan lain-lain terhadap pendapatan UMKM adalah sedang. Pada persamaan 8, pengaruh biaya kebutuhan makanan dan minuman, biaya kebutuhan non makanan dan minuman dan biaya kebutuhan lain-lain terhadap pendapatan UMKM secara bersama-sama adalah cukup knat.

Implikasi dari basil penelitian yang disebutkan di atas adalah bahwa aktivitas penyelenggaraan baji berpengaruh terbadap peningkatan aktivitas ekonomi (perbankan, biro perjalanan dan UMKM) di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Dan, sehubungan dengan basil penelitian ini diajukan saran kepada



Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Departemen Agama RI untuk menentukan biaya ONH yang terjangkau dan peningkatan pelayanan, sistem informasi terpadu dan pelaksanaan penyelenggaraan haji yang lebih baik.

Kata Kunci: Ongkos Naik Haji, Biro Perjalanan, UMKM,

A. Pendahuluan

Kebijaksanaan penyelenggaraan haji masih berpijak pada Keputusan Menteri No. 16 tahun 1965 yang untuk tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Urusan Haji dan di daerah oleh aparat pemerintah daerah c.q. Kepala Staff Urusan Haji. Perjalanan penyelenggaraan haji mengalami banyak perubahan yang pada akhirnya muncul Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 114/48 tahun 1968 yang mencabut keputusan sebelumnya, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan secara birokratis.

Secara bertahap usaha-usaha peningkatan di bidang pelayanan haji ditingkatkan dan dimantapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 269 tahun 1970 tentang susunan organisasi Ditjen Urusan Haji. Kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan Keputusan Menteri Agama No. 51 tahun 1971, SK Ditjen Urusan Haji No. DD/Haji/709/72 tahun 1972 tentang koordinasi haji seluruh Indonesia. Penyediaan asrama bagi jamaah haji juga diselenggarakan sejak tahun 1973 termasuk pemeriksaan kesehatan, pemberian paspor. Pada masa ini beberapa masalah masih dihadapi antara lain menyangkut; Syekh, barang bawaan, angkutan, karantina, umroh, visa, devaluasi dollar AS, akomodasi, armada, fasilitas antar pelabuhan, maupun fasilitas komunikasi. Tahun 1974 dikeluarkan peraturan melalui Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 yang intinya mengenai dokumentasi dan statistik di bidang urusan haji, bimbingan haji serta penyelenggaraan haji. 1

Sejak tahun 1979 ditetapkan bahwa angkutan haji dilaksanakan dengan angkutan udara. Pada masa periode tahun 1979 sampai dengan tahun 1998, pelaksanaan angkutan haji melalui pesawat udara dimonopoli oleh perusahaan penerbangan nasional PT. Garuda Indonesia. Baru pada tahun 1999, pelaksanaan angkutan haji melalui pesawat udara mulai mengikutsertakan perusahaan penerbangan asing sebagai pelaksana angkutan haji, yaitu Saudi Arabian Airlines (SV).

Salah satu dampak positif yang cukup signifikan dengan adanya kebijakan tersebut, adalah tarif angkutan haji dapat ditekan dan diturunkan sehingga berpengaruh dalam penetapan komponen biaya perjalanan haji yang sebagian besar merupakan biaya angkutan udara.²

Berdasarkan data sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2007 jumlah jamaah haji di Indonesia terus meningkat yakni pada tahun 1990 hanya 81.244 orang hingga tahun 1998 sebanyak 200.094. Tetapi sejak tahun 1999 pernah mengalami penurunan karena krisis ekonomi hanya 70.691. Kemudian meningkat kembali tahun 2000 hingga tahun 2007 pada kisaran 200.000 jamaah. Sedangkan jumlah jamaah haji DKI Jakarta meningkat pada periode 1990-1995 dari 6.777 orang menjadi 37.116 orang atau meningkat 547 %. Akan tetapi sejak tahun 1996 menjelang krisis ekonomi di Indonesia mengalami penurunan yang berarti yaitu hanya 5.569 orang saja. Sejak krisis ekonomi walaupun terus mengalami peningkatan jumlah jamaah haji DKI Jakarta berfluktuasi dalam kisaran 11.000 hingga 17.000 orang. Penurunan jamaah haji ini salah satu faktor adalah semakin mahalnya Ongkos Naih Haji (ONH) yang terus meningkat sejak tahun 1998 sehingga jumlah jamaah haji sejak tahun 2004 mengalami penurunan yakni dari 14.663 orang menjadi 7.051 orang pada tahun 2007 atau turun 52 %.

Ongkos Naik Haji (ONH) pada periode 1990-2007 juga terus semakin mahal seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Jika tahun 1990 ONH hanya Rp. 5.320.000,- maka pada tahun 2007 meningkat sebesar 550 %. Dalam upaya pelayanan jamaah haji telah dilakukan langkah-langkah efisiensi dengan mengurangi jumlah petugas pelayanan haji terutama sejak tahun 1995 yakni dari 332 orang petugas haji terus dikurangi hingga 120 orang pada tahun 2007. Kondisi ini terkait sebagai upaya untuk menekan ONH yang lebih murah dan lebih terjangkau.³

Dengan perubahan jumlah jamaah haji tersebut diatas aktivitas penyelenggaraan haji berdampak pada aktivitas ekonomi lainnya meliputi kegiatan transaksi melalui lalu lintas uang di lembaga jasa perbankan, money changer, perusahaan biro perjalanan (travel bureau), jasa pengangkutan barang, jasa pelayanan kesehatan serta para penjaja usaha kecil yang berkaitan dengan aktivitas haji dimana mereka berada. Lebih jauh lagi penyelenggaraan haji membawa implikasi pada aktivitas usaha, peningkatan pendapatan dan peningkatan kebutuhan modal usaha, penyerapan tenaga kerja, peningkatan laba usaha berbagai sektor usaha terkaitan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan.

Peranan sektor perbankan dalam mendukung aktivitas haji, para jamaah haji menyetor dana untuk ONH sebelum keberangkatan sampai berangkat naik haji ke tempat tujuan menghimpun dana yang besar. Dengan jumlah haji sekitar 200.000 jamaah dan ONH sekitar Rp. 30 juta per orang, berarti perputaran dana di sektor perbankan (bank pemerintah dan swasta) mencapai sekitar Rp 6 triliun. Di DKI Jakarta dengan jumlah jamaah 7.000 orang perputaran dana haji di 10 bank di wilayah DKI Jakarta berkisar Rp. 210 milyar rupiah. Peranan biro perjalanan terkait dengan ibadah haji menerima pesanan tiket dan pelayanan sejak berangkat hingga kembali ke tanah air melibatkan dana 45 % dari ONH di Indonesia atau sekitar Rp. 2,7 triliun dan di wilayah DKI Jakarta sekitar melibatkan perputaran dana sekitar Rp. 94,5 milyar yang dijalankan oleh sebanyak 1.525 biro perjalanan.

Selain jasa angkutan udara, aktivitas transportasi darat (termasuk kereta api) dan laut tetap diperlukan oleh jamaah haji yaitu untuk mendukung perjalanan dari tempat asal menuju tempat embarkasi, atau sebaliknya dari lokasi embarkasi (pada saat pulang haji) ke tempat asal jamaah. Aktivitas ekonomi lainnya adalah jasa tata boga (catering) selama jamaah di karantina di Asrama Haji, selama perjalanan pergi dan pulang maupun selama berada di Arab Saudi ketika melaksanakan ibadah haji. Selama di karantina jamaah haji meskipun mendapat fasilitas makan dan minum juga mengeluarkan pengeluaran lainnya untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman, beserta kebutuhan lain-lain di sekitar asrama haji yaitu para pedagang dan para usaha kecil. Oleh karena itu aktivitas ini juga berpengaruh terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar daerah pemondokan/karantina Asrama Haji. Menurut data BPS jumlah industri kecil di DKI Jakarta berkisar 2,8 juta sampai 3,0 juta unit usaha yang tersebar di berbagai wilayah dan sektor dengan menyerap jutaan tenaga kerja.

B. Kajian Teoritis

1. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi khususnya kebijakan makro ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan kebijakan makro ekonomi meliputi empat aspek yaitu : stabilisasi kegiatan ekonomi, pencapaian tingkat penyerapan tenaga kerja (kesempatan kerja) yang maksimal, pertumbuhan ekonomi yang teguh dan menghindari inflasi.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran

pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut Keyness, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius, peningkatan pendapatan nasional, pengenaan pajak dan sebagainya. Pengurangan pajak akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya pengeluaran agregat dapat ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah.

Kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan makro yang dilaksanakan lewat APBN. Suatu kebijaksanaan fiskal dicerminkan oleh struktur pos-pos dalam APBN, dan bukan hanya oleh nilai total penerimaan dan pengeluarannya.⁴

3. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter, mempengaruhi persediaan uang (berbentuk uang dan tabungan-tabungan) dan tingkat bunga (pinjaman). (Monetary policy affects the supply of money (basically currency plus commercial bank demand deposits) and the rate of interest).⁵

Kebijaksanaan moneter, adalah kebijaksanaan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar tersebut. Pemerintah (Bank Sentral) bisa melakukan hal ini dengan mempengaruhi secara tidak langsung nilai money multiplier dan secara langsung besarnya uang inti.⁶

Menurut Keynes, kebijaksanaan moneter dapat mempengaruhi situasi makro lewat jumlah uang beredar, kemudian tingkat bunga, kemudian pengeluaran investasi dan selanjutnya permintaan agregat. Akhir-akhir ini ekonom mulai memberikan perhatian mereka kepada kebijaksanaan "supphy side", yaitu kebijaksanaan (moneter) yang bisa mempunyai pengaruh langsung terhadap penawaran agregat (menggeser kurva penawaran agregat). Tetapi sampai sekarang belum ada teori yang mantap mengenai "sisi penawaran" ini. 7

4. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi

Teori-teori pembangunan ekonomi di negara berkembang pasca Perang Dunia Kedua terdiri dari empat pendekatan yaitu:

- a. model-model pertumbuhan bertahap linier (linear-stages-of growth models);
- b. kelompok teori dan pola-pola perubahan struktural (the structural change theories and patterns);
- c. revolusi ketergantungan nasional (international dependence);

d. kontra revolusi pasar bebas neoklasik (neoclassical free-market counterrevolutions). 8

5. Pembangunan Wilayah (Regional Development)

Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang mendapatkannya terbatas. Ilmu Ekonomi Regional (IER) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain.

IER tidak membahas kegiatan individual melainkan menganalisis suatu wilayah (atau bagian wilayah) secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah.

6. Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan indikator penting dalam pembangunan karena keberhasilan suatu pembangunan dapat diidentifikasi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa ukuran tentang kesejahteraan masyarakat diantaranya misalnya tingkat pendapatan rumah tangga, pengeluaran rata-rata per kapita, angka kematian bayi, tingkat pendidikan anak sekolah laki-laki dan perempuan maupun tenaga kerja dan jam kerja yang digunakan untuk bekerja dan sebagainya. ¹⁰

Indikator yang populer untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah berkurangnya angka kemiskinan. Berkurangnya penduduk miskin juga berarti bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran akan memberi petunjuk kepada aspek pemerataan yang telah dicapai. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan.

Indikator pembangunan terdiri dari indikator moneter dan indikator non moneter. Indikator moneter terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu (1) Pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan dan (2) Kesejahteraan ekonomi bersih Sedangkan indikator non moneter terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu (1) Indikator sosial, (2) Indikator kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia (3) Indikator campuran. ¹¹

7. Aktivitas Ekonomi

Aktivitas ekonomi berarti kegiatan-kegiatan yang dikerjakan yang ada kaitannya dengan perekonomian. Kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan dukungan sejumlah faktor produksi tersebut sangat tergantung pada cara-cara yang digunakan dalam produksi. Misalnya, seorang petani yang hanya menggunakan cangkul untuk mengerjakan sawahnya tentu akan mendapatkan hasil kerja lebih kecil daripada petani yang mempergunakan bajak yang ditarik traktor (tanah yang digarap diasumsikan cukup luas sehingga penggunaan traktor dimungkinkan). Dengan demikian dapat disimpulkan aktivitas ekonomi memerlukan 3 (tiga) unsur sebagai berikut Keinginan Manusia, Faktor-Faktor Produksi (i) Tanah dan Sumber Daya Alam, (ii) Tenaga Kerja, (iii) Modal dan (iv) Kewirausahaan serta Cara Berproduksi. 12

Pengertian aktivitas dalam konteks pembangunan wilayah adalah aktivitas dalam memproduksi barang dan jasa termasuk jangkauan distribusinya, sehingga seluruh wilayah dapat terdorong kemajuannya. Jadi bersifat menstimulir perbesaran produksi dan perluasan dalam kegiatan sosial ekonomi. ¹³

8. Teori Keunggulan Bersaing (Competitive Advantage Theory)

Terdapat 4 (empat) atribut yang membentuk lingkungan dimana perusahaan lokal dapat bersaing untuk mempromosikan dan mendorong penciptaan keunggulan bersaing suatu negara dengan sukses:

- a. Kondisi Faktor (factor conditions). Kedudukan negara dalam faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja terampil atau infrastruktur, segala sesuatu yang diperlukan dalam industri tertetu.
- b. Kondisi Permintaan (demand condition). Kondisi permintaan secara alami di dalam negeri bagi industri barang dan jasa.
- c. Industri yang berhubungan dan mendukung (related and supporting industries). Ada atau tidaknya pasokan dari negara terhadap industri maupun industri yang berkaitan yang secara internasional dapat bersaing.
- d. Strategi perusahaan, struktur dan pesaing (firm strategy, structure, and rivalry). Kondisi suatu pemerintahan negara tentang bagaimana perusahaan didirikan, diorganisasikan dan dikelola serta persaingan domestik secara alami. 4.

9. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Salah satu teori motivasi dalam hal kebutuhan menurut A.H. Maslow antara lain kebutuhan akan penghargaan atau kebutuhan

egoistik untuk penghargaan diri, maupun penghargaan dari pihak lain. Kebutuhan akan penghargaan diri, mencakup kebutuhan untuk mencapai kepercayaan diri, prestasi, kompetensi, pengetahuan, diri penghargaan dan kebebasan serta independensi kebutuhan (ketidakketergantungan). Kelompok kedua penghargaan mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan reputasi seseorang individu, atau penghargaan diri dari pihak dari pihak lain, kebutuhan akan status, pengakuan, apresiasi terhadap dirinya dan respek yang diberikan oleh pihak lain.15.

Jika ditinjau dari sudut pandang yang praktis dan konseptual, maka rukun-rukun Islam yang terpenting yang memberikan motivasi kepada nation muslim dan yang membuat warga-warganya sadar, merdeka, terhormat serta memiliki tanggung jawab sosial adalah tauhid, jihad dan haji. 16

Haji berarti : ziarah, atau sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima. Serupa dengan haji adalah umrah, yang juga berarti : berkunjung, atau beribadah ke Baitullah. ¹⁷

Ibadah haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. 18

10. Penelitian Yang Relevan

Penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Malaysia dengan mendirikan Lembaga Tabung Haji (Lembaga Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji) yang didirikan tahun 1962) dan dimulai sejak tahun 1969 mengakui Tabung Haji sesuai Akta No. 8 Pemerintah Malaysia ternyata dapat meningkatkan perputaran uang. Pada tahun 2003 asset yang dikelola Tabung Haji Malaysia mencapai 10,23 Milyar Ringgit dengan pertumbuhan 10%. Modal yang telah dikumpulkan kemudian dikelola untuk aktivitas ekonomi dan memberi peluang kerja bagi warga Malaysia dalam bidang jasa properti, perkebunan, teknologi serta kegiatan travel. Selain itu juga dapat membantu penyelenggaraan ibadah haji dalam hal pemilihan sewa tempat yang lebih baik, penentuan jenis jasa penerbangan dan kegiatan ekonomi lainnya. 19 Dengan adanya Tabung Haji dapat menekan biaya perjalanan ibadah haji. Sebagai contoh menurut Tabung Haji Malaysia 2005 biaya perjalanan haji tahun 2004 (8.973 sampai dengan 9.096 RM) lebih murah dari pada biaya pada tahun 2003 (berkisar 9.454 RM).

2. Definisi Operasional Variabel

Tabel 1 Batasan Operasional Variabel Penelitian Data Sekunder

Variabel	Indikator	Ukuran	Data	
(Y ₁)	Pendapatan usaha kotor bank dalam satu tahun.	Juta Rupiah (Rasio)	Sekunder	
(Y ₂)	Pendapatan usaha kotor biro perjalanan dalam satu tahun.	Juta Rupiah (Rasio)	Sekunder	
(Y ₃)	Pendapatan usaha kotor UMKM dalam satu tahun.	Juta Rupiah (Rasio)	Sekunder	
(X ₁)	Biaya penerbangan, biaya operasional dalam negeri langsung dan tidak langsung), biaya administrasi.	Rupiah (Rasio)	Sekunder	
(X ₂)	Jumlah orang yang naik haji (regular dan plus).	Orang (Rasio)	Sekunder	
(X ₃)	Jumlah TPHI, TKHI, petugas lainnya.	Orang (Rasio)	Sekunder	

Tabel 2
Batasan Operasional Variabel Penelitian
Data Primer

Variabel	Indikator	Ukuran	Data
(Y)	Persepsi Pendapatan usaha kotor UMKM dalam satu tahun.	Skala Likert (Ordinal)	Primer
(X ₁)	Persepsi uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan makanan/minuman.	Skala Likert (Ordinal)	Primer
(X ₂)	Persepsi uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan non- makanan/minuman.	Skala Likert (Ordinal)	Primer
	Persepsi uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan lain-lain.	Skala Likert (Ordinal)	Primer

Tabel 3
Pengertian Variabel-variabel Penelitian

Variabel-Variabel	Pengertian
Pendapatan Usaha Perbankan (Y1)	Total pendapatan usaha bank yang diperoleh dalam setahun.
Pendapatan Usaha Biro Perjalanan Haji (Y2)	Total pendapatan usaha Biro Perjalanan yang diperoleh dalam setahun
Pendapatan Usaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM (Y3)	Total pendapatan usaha UMKM yang diperoleh dalam setahun

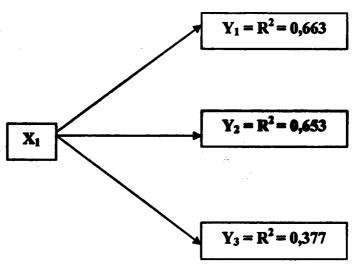
Ongkos Naik Haji (X ₁)	Biaya yang dikeluarkan/disetor oleh jamaah haji untuk setahun (sekali naik haji)
Jumlah Haji (X2)	Banyaknya orang yang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji untuk setahun (sekali naik haji)
Jumlah Petugas Haji (X3)	Jumlah orang yang melayani para jamaah haji selama penyelenggaraan haji.
Pendapatan Usaha, Usaha Mikro Kecil dan Menengah /UMKM (Y)	Total pendapatan usaha UMKM yang diperoleh dalam setahun
Biaya kebutuhan makanan/minuman (X ₁)	Biaya yang dikeluarkan (diluar ONH) oleh jamaah haji untuk membeli makanan, minuman dan obat-obatan sebelum berangkat perjalanan haji yakni selama berada di karantina asrama haji.
Biaya kebutuhan non-makanan/ minuman (X2)	Biaya yang dikeluarkan (diluar ONH) oleh jamaah haji untuk membeli kebutuhan diluar makanan dan minuman (pakaian dan kebutuhan lainnya) sebelum berangkat perjalanan haji yakni selama berada di karantina asrama haji.
Biaya kebutuhan lain-lain (X3)	Biaya yang dikeluarkan (diluar ONH) oleh jamaah haji untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain sebelum berangkat perjalanan haji yakni selama berada di karantina asrama haji.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- 1. Hipotesis 1 (Ongkos Naik Haji Terhadap Aktivitas Perekonomian Sektor Perbankan, Biro Perjalanan dan UMKM)
- 1) Persamaan 1 (Perbankan) $Y_1 = 3.421.184 + 2,156X_1$
- 2) Persamaan 1 (Biro Perjalanan) $Y_2 = 104,824.5 + 0,02395X_1$
- 3) Persamaan 1 (UMKM) Y3 = 32.862,157 + 0,003224X1

Persamaan tersebut digambar sebagai berikut:

map.



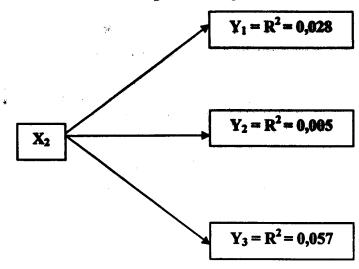
Gambar 2 Persamaan 1 Pengaruh Ongkos Naik Haji Terhadap Aktivitas Ekonomi

Pengaruh variabel ongkos naik haji (X₁) terhadap pendapatan perbankan (Y₁) adalah 66,3% sedangkan sisanya 33,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pengaruh variabel ongkos naik haji (X₁), terhadap pendapatan biro travel (Y₂) adalah 65,3% sedangkan sisanya 34,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pengaruh variabel ongkos naik haji (X₁) terhadap pendapatan UMKM (Y₃) adalah 37,7% sedangkan sisanya 62,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

2. Hipotesis 2 (Jumlah Haji Terhadap Aktivitas Perekonomian Sektor Perbankan, Biro Perjalanan dan UMKM)

- (1) Persamaan 2 (Perbankan) $Y_1 = 23.800.782 + 250,189X_2$
- (2) Persamaan 2 (Biro Perjalanan) $Y_2 = 274.550,0 + 1,119X_2$
- (3) Persamaan 2 (UMKM) Y3 = 47.719,493 + 0,700X2

Persamaan tersebut digambar sebagai berikut:



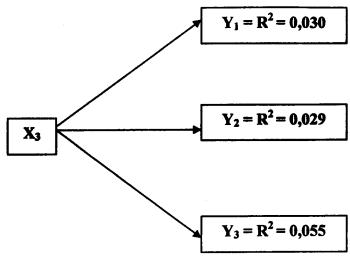
Gambar 3. Persamaan 2 Pengaruh Jumlah Haji Terhadap Aktivitas Ekonomi

Pengaruh variabel jumlah haji (X₂) terhadap pendapatan perbankan (Y₁) adalah hanya 2,8% sedangkan sisanya 97,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pengaruh variabel jumlah haji (X₂) terhadap pendapatan biro perjalanan (Y₂) adalah hanya 0,5% sedangkan sisanya 99,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pengaruh variabel jumlah haji (X₂) terhadap pendapatan UMKM (Y₃) adalah 5,7% sedangkan sisanya 94,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

3. Hipotesis 3 (Petugas Haji Terhadap Aktivitas Perekonomian Sektor Perbankan, Biro Perjalanan dan UMKM)

- (1) Persamaan 3 (Perbankan) $Y_1 = 25.497.587 + 32.024,319X_3$
- (2) Persamaan 3 (Biro Perjalanan) Y2 = 232.175,6 + 352,100X3
- (3) Persamaan (UMKM) Y3 = 43.557,783 + 86,085X3

Persamaan tersebut digambar sebagai berikut :

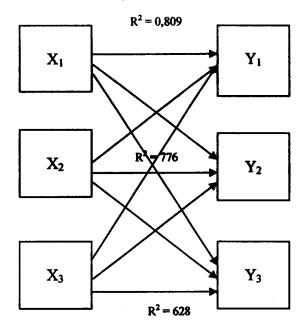


Gambar 4 Persamaan 3 Pengaruh Petugas Haji Terhadap Aktivitas Ekonomi

Pengaruh variabel petugas haji (X₃) terhadap pendapatan perbankan (Y₁) adalah hanya 3,0% sedangkan sisanya 97,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pengaruh variabel petugas haji (X₃) terhadap pendapatan biro perjalanan (Y₂) adalah hanya 2,9% sedangkan sisanya 97,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pengaruh variabel petugas haji (X₃) terhadap pendapatan UMKM (Y₃) adalah hanya 5,5% sedangkan sisanya 94,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

- 4. Hipotesis 4 (Ongkos Naik Haji, Jumlah Haji dan Petugas Haji Terhadap Aktivitas Perekonomian Sektor Perbankan, Biro Perjalanan dan UMKM)
 - (1) Persamaan 4 (Perbankan) $Y_1 = 6.348.858,7 + 2,637X_1 + 1.192,484X_2 + 144.080,5X_3$
 - (2) Persamaan 4 (Biro Perjalanan) $Y_2 = 13.387,871 + 0,02487X_1 + 9,250X_2 + 469,158X_3$
 - (4) Persamaan 4 (UMKM) $Y_3 = 13.154,511 + 0,004466X_1 + 2,630X_2 + 169,150X_3$

Persamaan tersebut digambar sebagai berikut:



Gambar 5 Persamaan 4 Pengaruh ONH, Jumlah Haji, Jumlah Petugas Haji Terhadap Aktivitas Ekonomi (Perbankan, Biro Perjalanan dan UMKM)

Pengaruh variabel ongkos naik haji (X₁), jumlah haji (X₂) dan petugas haji (X₃) terhadap pendapatan perbankan (Y₁) adalah 80,9% sedangkan sisanya 19,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pengaruh variabel ongkos naik haji (X₁), jumlah haji (X₂) dan petugas haji (X₃) terhadap pendapatan biro perjalanan (Y₂) adalah 77,6% sedangkan sisanya 22,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pengaruh variabel ongkos naik haji (X₁), jumlah haji (X₂) dan petugas haji (X₃) terhadap pendapatan UMKM (Y₃) adalah 62,8% sedangkan sisanya 37,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

5. Hipotesis 5 (Biaya Kebutuhan Makanan/Minuman terhadap Pendapatan UMKM)

Persamaan 5 (UMKM) $Y = 2.176 + 0.425X_1$ Adapun persamaan tersebut digambarkan sebagai berikut:

$$R^2 = 0,266$$

$$X_1 \qquad Y$$

Gambar 6 Persamaan 5 Pengaruh Biaya Kebutuhan Makanan/Minimum Terhadap Pendapatan UMKM

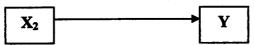
Pengaruh variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman (X1) terhadap pendapatan UMKM (Y) adalah 26,6% sedangkan sisanya 73,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

6. Hipotesis 6 (Biaya Kebutuhan Non Makanan/Minuman terhadap Pendapatan UMKM)

Persamaan 6 (UMKM)

$$Y = 2,083 + 0,433X_2$$

Adapun persamaan tersebut digambar sebagai berikut : $R^2 = 0.329$



Gambar 7 Persamaan 6 Pengaruh Biaya Kebutuhan Non-Makanan/Minimum Terhadap Pendapatan UMKM

Pengaruh variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman (X1) terhadap pendapatan UMKM (Y) adalah 32,9% sedangkan sisanya 67,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

7. Hipotesis 7 (Biaya Kebutuhan Lain-Lain terhadap UMKM) Persamaan 7 (UMKM)

$$Y = 1,555 + 0,591X3$$

Adapun persamaan tersebut digambar sebagai berikut:

$$R^2 = 0,413$$



Gambar 8 Persamaan 7 Pengaruh Biaya Kebutuhan Lain-Lain Terhadap Pendapatan UMKM

Pengaruh variabel biaya kebutuhan lain-lain (X1) terhadap pendapatan UMKM (Y) adalah 41,3% sedangkan sisanya 58,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

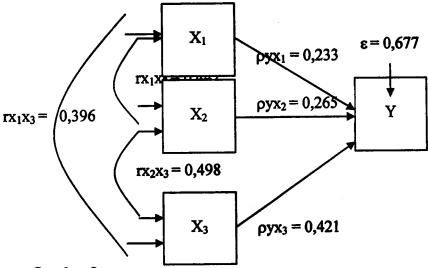
8. Hipotesis 8 (Biaya Kebutuhan Makanan/Minuaran, Kebutuhan Non Makanan/Minuman dan Kebutuhan Lain-Lain terhadap UMKM)

Persamaan 8:

$$Y = \rho y x_1.X_1 + \rho y x_2.X_2 + \rho y x_3.X_3 + \Box$$

 $Y = 0.233X_1 + 0.265X_2 + 0.421X_3 + \Box$

Diagram jalur untuk persamaan 8 adalah sebagai berikut:



Gambar 9 Diagram Analisa Jalur Persamaan 8

Pengaruh variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman (X_1) , variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman (X_2) dan variabel biaya kebutuhan lain-lain (X_3) terhadap variabel pendapatan UMKM (Y) adalah 54,2% (R Square= 0,542). Sedangkan sisanya 45,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Persamaan jalur dalam model 8 adalah sebagai berikut: $Y = 0,233 X_1 + 0,265 X_2 + 0,421 X_3 + 0,677$. Variabel yang dominan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM adalah variabel biaya kebutuhan lain-lain (koefisien jalur = 0,421), variabel biaya kebutuhan non makanan dan minuman (koefisien jalur = 0,265) dan variabel biaya kebutuhan makanan dan minuman (koefisien jalur = 0,233).

D. Kesimpulan

a. Pengaruh ongkos naik haji terhadap pendapatan perbankan adalah cukup kuat. Pengaruh ongkos naik haji terhadap pendapatan biro perjalanan adalah adalah cukup kuat. Pengaruh ongkos naik haji terhadap pendapatan UMKM adalah lemah.

b. Pengaruh jumlah haji terhadap pendapatan perbankan adalah sangat lemah. Pengaruh jumlah haji terhadap pendapatan biro perjalanan adalah sangat lemah. Pengaruh jumlah haji terhadap pendapatan UMKM (Y₃) adalah sangat lemah.

c. Pengaruh petugas haji terhadap pendapatan perbankan adalah sangat lemah. Pengaruh petugas haji terhadap pendapatan biro perjalanan adalah sangat lemah. Pengaruh petugas haji terhadap pendapatan UMKM (Y₃) adalah sangat lemah.

d. Pengaruh ongkos naik haji, jumlah haji dan petugas haji terhadap pendapatan perbankan secara bersama-sama adalah sangat kuat. Pengaruh ongkos naik haji, jumlah haji dan petugas haji terhadap pendapatan biro perjalanan adalah kuat. Pengaruh ongkos naik haji, jumlah haji dan petugas haji terhadap pendapatan UMKM (Y₃) adalah kuat.

e. Pengaruh biaya kebutuhan makanan dan minuman terhadap pendapatan UMKM adalah lemah.

f. Pengaruh biaya kebutuhan non makanan dan minuman terhadap pendapatan UMKM adalah lemah.

g. Pengaruh biaya kebutuhan lain-lain terhadap pendapatan UMKM adalah sedang.

h. Pengaruh biaya kebutuhan makanan dan minuman, biaya kebutuhan non makanan dan minuman dan biaya kebutuhan lainlain terhadap pendapatan UMKM secara bersama-sama adalah cukup kuat. Variabel yang dominan mempengaruhi pendapatan UMKM adalah biaya kebutuhan lain-lain. Sumbangan efektif yang dihasilkan dari biaya kebutuhan lain-lain terhadap pendapatan UMKM adalah sebesar 27% dimana melalui pengaruh langsung sebesar 18% dan pengaruh tidak langsung sebesar 9%.

Catatan Akhir:

¹Direktorat Jenderal Urusan Haji, 1978. Laporan penyelenggaraan urusan baji dari tahun 1965 s/d 1978. Jakarta.

²Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2007. Laporan akbir. evaluasi kebijakan pemerintah terkait dengan persaingan usaha dalam rancangan perubahan undang undang No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji. Jakarta.

³Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Laporan Penyelenggaraan haji 1990-2007, Jakarta.

⁴Boediono, 2005. Ekonomi makro. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE, hal 132. ⁵Nafziger E.W, 1997. The Economic of developing countries. Third Edition. Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey, hal 398

Boediono, 2005. Ekonomi makro. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE, hal 106

7Ibid, hal 106

Todaro., M. 2000. Pembangunan ekonomi di dunia ketiga. Penerjemah: Haris Munandar. Jakarta: Erlangga, hal 93

Tarigan, Robinson. 2006. Ekonomi regional (teori dan aplikasi). Edisi Revisi.

Jakarta: PT Bumi Aksara, hal 1-2

10 Badan Pusat Statistik, 1992-1998. Indikator kesijahteraan Rakyat. Jakarta: BPS Pusat Jakarta.

¹¹Arsyad Lincolin, 1999. Ekonomi pembangunan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi

Ilmu Negara Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, hal 25

12Fuad, M, dkk 2001, Pengantar Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

¹³Djamaluddin, A.Arief, 2002. Ekonomi pembangunan. Jakarta.

¹⁴Porter. E. Michael. 1990. The Competitive advantage of nations. The London and Basingstoke: Macmillan Press Ltd, hal 71

15Winardi, 2002. Motivasi dan pemotivasi dalam manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 15

¹⁶Nidjam dan Hanan, 2003. Manajemen baji studi kasus dan telaah implementasi knowledge workers. Jakarta: Zikrul Hakim, hal 2.

17 Saleh Hassan E., 2000. Studi Islam di Perguruan Tinggi Pembinaan IMTAQ dan

Pengembangan Wawasan,. Cetakan Kedua (Revisi). ISTN. Jakarta, 2000, hal 199

18Undang-Undang R.I. Nomor: 17 TAHUN 1999. Tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Undang-Undang RI. Nomor: 38 Tahun 1999 Tentang pengelelaan zakat 1999, Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, hal 5

19Susilawati, Afaf, 2005. Mengenal lebih dekat layanan tahung baji Malaysia.

Jakarta: Ikhlas Nomor 40 Tahun VIII Desember 2005, hal 16-17

²⁰Republika. 2005. Studi banding tahung haji Malaysia. Jakarta: 21 September 2005.

²¹Kuncoro, M. 2003. Metode riset untuk bisnis dan ekonomi bagaimana meneliti dan menulis tesis. Jakarta: Erlangga, hal 215.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyid, Harun. 1994. Statistika sosial. Disunting oleh Teguh Kismantoroadji. Bandung. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Arsyad Lincolin, 1999. Ekonomi punbangunan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Negara Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Asita, 2006. Association of the indenesia tour and travel agency. Jakarta: DPD ASITA DKI Jakarta.www.asita.org.
- Badan Pusat Statistik, 1992-1998. Indikator kesejahteraan Rakyat. Jakarta : BPS Pusat Jakarta.

- Badan Pusat Statistik, 2003. *Jakarta dalam angka 2002*. Jakarta : BPS Propinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2003. Indikator industri kecil dan kerajinan rumahtangga 1996-2001. Jakarta: BPS Propinsi DKI Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2000-2007. *Jakarta Timur dalam angka*. Jakarta: BPS Propinsi DKI Jakarta.
- Bank Indonesia, 1990-2004. Direktori Perbankan Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Boediono, 1994. Ekonomi mikro. Yogyakarta: BPFE
- Boediono, 2005. Ekonomi makro. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
- Case And Fair, 2004. Prinsip-prinsip ekonomi makro. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Chapra M. Umer, 2000. Islam dan tantangan ekonomi. Jakarta: Penerbit Andalan.
- Departemen agama R.I., 2004. Penyelenggaraan ibadah haji 1425 H/2005 M. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2004.
- Rampai Perhajian. Cetakan II. Jakarta :Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- ----- 2004. Sistem pendaftaran haji. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- -----, 2004. Data dan profil jamaah haji Indonesia tahun 2000 s.d. 2004. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- -----., 2001. Data dan profil jamaah baji Indonesia tahun 1997 s.d. 2001. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat alam dan Penyelenggaraan Haji.
- .1981. Agama dalam pembangunan nasional (bimpunan sambutan presiden soebarto). Jakarta: Pustaka Biru.
- Dinas Pariwisata Dki Jakarta, 2005. Jakarta travel directory. Jakarta: Jakarta. City Government Tourism Office.

- Direktorat Jenderal Urusan Haji, 1978. Laporan penyelenggaraan urusan haji dari tahun 1965 s/d 1978. Jakarta.
- Djamaluddin, A. Arief, 2000. Penggunaan model-model pembangunan dalam perencanaan ekonomi regional. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan Press.
- ----, 2002. Ekonomi pembangunan. Jakarta.
- Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1983. Laporan penyelenggaraan urusan haji tahun 1979- 1983. Jakarta.
- Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004. Keputusan Direktur Jenderal bimbingan islam dan penyelenggaraan haji. Nomor: D/163/Tahun 2004. tentang sistem pendaftaran haji. 27 April 2004, Jakarta.
- Froyen, Richard T And Linda Low. 2001. Macroeconomics (An Asian perspective). Singapore. Prentice Hall Pearson Education. Asia Pte. Ltd.
- Hakim, A., 2002. Ekonomi pembangunan. Yogyakarta: Ekonisia.
- Harahap dan Mursidi, 1994. Lintasan sejarah perjalanan jamaah haji Indonesia. Jakarta: Inti Media.
- Hill, Hal, 2002. Ekonomi Indonesia. Edisi Kedua. Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso dan Hadi Susilo. Edisi Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jhingan, 2000. Ekonomi pembangunan dan perencanaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2007. Laporan akhir. evaluasi kebijakan pemerintah terkait dengan persaingan usaha dalam rancangan perubahan undang-undang No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2000. Metode kuantitatif. Jakarta: Erlangga.
- ------ 2002, Ekonomi pembangunan, teori, masalah, dan kebijakan. Yogyakarta: UPP AMP UKPN.
- meneliti dan menulis tesis. Jakarta: Erlangga.
- Lembaga Studi Agama & Sosial dan PT. Kotoni Pesisir Sulawesi, 2004. Petunjuk perjalanan baji & umrab, Jakarta: PT. Kotoni Pesisir Sulawesi.

- Masngudi dan Meirinaldi. 1996. Kewirausahaan (diktat kuliah). Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur.
- Nafziger E.W., 1997. The Economic of developing countries. Third Edition. Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey.
- Nidjam dan Hanan, 2003. Manajemen haji studi kasus dan telaah implementasi knowledge workers. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Porter. E. Michael. 1990. The Competitive advantage of nations. The London and Basingstoke: Macmillan Press Ltd.
- Riduwan, 2007. Cara menggunakan dan memakai analisis jalur (path analysis). Bandung: Alfabeta.
- Rosjad, Moch. Abd. H., 2004. Penyusunan Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) Tahun 2005. Jakarta: Bulletin Al-Mabrur Nomor 04/Agustus/2004 M/1425 H.
- Rostow, W.W. 1960. The Stage of economic growth: A Non Comunism Manifesto. London: Cambridge University Press.
- Saleh Hassan E., 2000. Studi Islam di Perguruan Tinggi Pembinaan IMTAQ dan Pengembangan Wawasan,. Cetakan Kedua (Revisi). ISTN. Jakarta, 2000.
- Singarimbun, M. dan Sofian Effendi (Editor), 1989. Metode penelitian survai. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono, 2002. Metode penelitian bisnis. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2004. Metode penelitian administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno S., 1999. Pengantar teori makroekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2006. Ekonomi pembangunan. Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suryana, 2000. Ekonomi pembangunan, problematika dan pendekatan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Susilawati, Afaf, 2005. Mengenal lebih dekat layanan tabung haji Malaysia. Jakarta: Ikhlas Nomor 40 Tahun VIII Desember 2005.
- Tarigan, Robinson. 2006. Ekonomi regional (teori dan aplikasi). Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____. 2008. Perencanaan pembangunan wilayah. Edisi Revisi. Jakarta. PT Bumi Aksara.

- Todaro., M. 2000. Pembangunan ekonomi di dunia ketiga. Penerjemah: Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang R.I. Nomor: 17 TAHUN 1999. Tentang penyelenggaraan ibadah baji dan Undang-Undang RI. Nomor: 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat 1999, Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi.
- Wahana Komputer, 2005. Pengembangan analisis multivariate SPSS 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijanto, Setyo Hari, 2008. Structural equation modelling dengan lisrel 8.8. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wirasasmita, Yuyun. 1999. Kewiransahaan dan wiransaha. Bandung. IKIP.
- Winardi, 2002. Motivasi dan pemotivasi dalam manajemen. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Media Massa dan Internet/Blog:

- http://64.203.71.11/kompas-cetak/0312/Fokus/764560/htm Semarak di asrama haji. Sabtu, 27 Desember 2003.
- http://64.203.71.11/kompas-cetak/0312/Fokus/764560/htm

 Kisruh penyelenggaraan haji. Hery Sucipto. Sabtu, 27

 Desember 2003.
- http://64.203.71.11/kompas-cetak/0312/Fokus/764560/htm Saatnya privatisasi urusan haji. Sabtu, 27 Desember 2003.
- http://64.203.71.11/kompas-cetak/0312/Fokus/764560/htm Monopoli haji dan buruknya pelayanan. Sabtu, 27 Desember 2003.
- http://www.informasihaji.com. DEPARTEMEN AGAMA R.I., 2004. Pedoman teknis pendaftaran baji tahun 2005 M/1425 H. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2004.
- http://www.pikiran-rakyat.com. KBIH kbusus sambut baik pembebasan kuota baji. jangan sebatas Wacana. 6 Desember 2004.
- http://www.gatra.com Penyelenggara baji operasi bersib pemilik ka'bab. Endang Sukendar, Rachmat Hidayat dan Alfian (Nasional). Edisi 33 25 Juni 2004.

- KOMPAS, 2005. Biaya haji pemerintah tidak bisa turunkan BPIH. Jakarta.
- REPUBLIKA. 2005. Studi banding tabung haji Malaysia. Jakarta: 21 September 2005.
- REPUBLIKA. 2005. Mereka menyambut positif. Jakarta: 21 September 2005.
- http://www.suaramerdeka.com. Asosiasi penyelenggara haji cukup satu. Suara Merdeka Cyber News. 22 Februari 2005.
- http://www.depkominfo.go.id./portal. Departemen agama cabut izin empat KBIH. 26 April 2006.
- http://www.detiknews.com/index.php. Depag gagal cari angkutan haji lebih murah dari garuda. Arfi Bambani Amri. 24 Mei 2006.
- http://www.depag.go.id/index.php. Penjelasan Departemen Agama tentang masalah katering di arafah dan mina (armina) musim haji tahun 1427 H. 5 Januari 2007.
- http://www.solusi.hukum.com/berita. Swastanisasi haji, hanya mimpi. 28/11/2007.
- http://www.republika.co.id/jurnalhaji/detail. Walikota Depok sesalkan terlantarnya jemaah haji. Kamis, 17 Januari 2008.
- http://cordova-travel.com/blog. "Evaluasi haji": smartBLOG: oleh-oleh dari "evaluasi haji". Posted on February 11, 2008.
- http://www.republika.co.id/jurnalhaji/detail. Dewan minta soal pemondokan haji dibenahi. Senin, 11 Februari 2008.
- http://www.republika.co.id/jurnalhaji/detail. KPPU usulkan kuota penyelenggaraan onh plus dicabut. Jum'at, 22 Februari 2008.
- http://www.republika.co.id/jurnalhaji/detail. Menag: saya tidak menclamencle dalam perusahaan haji. Kamis, 28 Februari 2008.
- http://www.republika.co.id/jurnalhaji/detail. Penyelenggara haji tanpa izin. Senin, 9 Maret 2008.
- http://www.republika.co.id/jurnalhaji/detail. Menag: sistem baru pendastaran baji untungkan semua pibak. Rabu, 26 Maret 2008.
- http://www.republika.co.id/jurnalhaji/detail. Peminat haji plus tetap banyak meskipun onb tinggi. Sabtu, 12 April 2008.
- http://www.republika.co.id/jurnalhaji/detail. Haji: prioritas bagi yang belum. Sabtu, 18 April 2008.

- http://www.depag.go.id/index.php. DPR setuju biaya haji 2008. Senin, 5 Mei 2008.
- http://www.depag.go.id/index.php. Menag: pendaftaran jemaah khusus untungkan semua pihak. Senin, 5 Mei 2008.
- http://www.depag.go.id/index.php. DPR setujui RUU perubahan penyelenggaraan ibadah haji. Senin, 5 Mei 2008.
- http://www.umrahhajiplus.com/member..php. Anggota resmi AMPHURI.. Senin, 9 Mei 2008.